

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan judul:

Peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat, yaitu sebagai berikut:

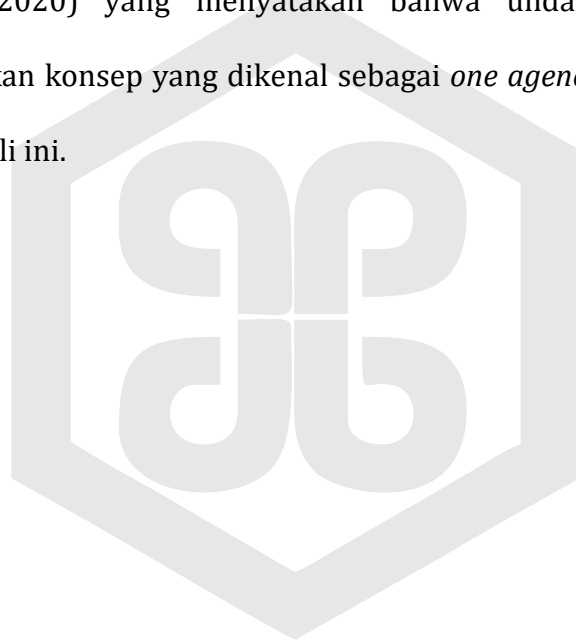
1. Analisis Peranan BAKAMLA
  - a. Pelaksanaan Peran Bakamla RI melakukan operasi penegakan Hukum di laut dan memiliki 2 strategi yang terdiri dari strategi penangkalan dan strategi penindakan, dengan kekuatan yang dilibatkan merupakan kekuatan Bakamla RI, baik kapal patroli, pesawat patroli udara maritim dan personel intelijen, dengan dukungan informasi dari instansi terkait yang telah diolah oleh Puskodal Opskamla serta dukungan perkuatan dari instansi terkait atau stakeholder yang memiliki kewenangan di laut.
  - b. Peran Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat, adalah menangani semua kegiatan maritim yang melanggar hukum, seperti penangkapan ikan ilegal, penggelapan bahan bakar, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah. Berdasarkan kesepakatan dan kemauan bersama untuk mewujudkan pelaksanaan patroli

keamanan dan keselamatan maritim terpadu yang efektif dan efisien di laut teritorial Indonesia.

- c. Salah satu Peran Bakamla yakni dengan Salah satu tanggung jawab Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat adalah melaksanakan operasi khusus yang dilakukan oleh badan keamanan maritim Indonesia di negara yang diselenggarakan oleh Bakamla Indonesia di seluruh perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia.
- d. Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan dilaut, mempunyai beberapa cara yang bersifat strategis agar peran bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut khususnya di zona maritim barat menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat terciptanya suatu good governance yang baik di wilayah zona maritim barat yang tertera dalam (Peraturan Kabakamla no 8 mengenai *Standar Operasional Prosedure*, 2017), sebagai berikut:
  - 1) Pendekatan Operasi
  - 2) Strategi Operasi
  - 3) Bentuk Operasi
  - 4) Sifat Operasi
  - 5) Jenis Operasi

2. Berdasarkan pelaksanaan perannya Bakamla di zona maritim barat melakukan fungsinya sesuai dengan peran Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat sehingga terwujudnya kondisi laut atau perairan yang aman, tenteram, berkelanjutan, dan sejahtera inilah yang diharapkan. Dalam kondisi seperti ini, masih perlu ditingkatkan karena masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, seperti masalah keterbatasan anggaran operasional dan fakta bahwa tidak semua lapisan masyarakat dan semua kementerian/lembaga bekerja-sama dalam kebijakan ini. Dengan demikian Bakamla belum maksimal dalam menangani pengamanan laut dan perairan Indonesia di perbatasan zona maritim barat, yang ditangani oleh Badan Keamanan Laut dalam pelaksanaan peran menjaga keamanan maritim di zona maritim barat. Tugas Bakamla dalam mengelola keamanan maritim di zona maritim barat meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh Bakamla untuk menjaga keamanan laut, khususnya di zona maritim barat, dengan melakukan patroli di wilayah yang rentan terhadap kejahatan maritim. Bakamla melakukan sinergi patroli dengan instansi atau pihak lain yang memiliki kekuatan di laut karena Bakamla tidak bisa menjaga keamanan maritim sendirian. Undang-undang maritim secara khusus mengharuskan Bakamla untuk berkoordinasi dan mengawasi tindakan dengan otoritas terkait dalam hal patroli keamanan dan keselamatan di laut. Pola sinergi yang diatur oleh Bakamla diyakini akan

memungkinkan penanganan semua aktivitas kriminal aktual dan prospektif di seluruh wilayah laut Indonesia. Menurut pendapat Arie dalam Media Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa undang-undang kelautan mendefinisikan konsep yang dikenal sebagai *one agency, multi-doors* dalam sinergi patroli ini.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Peran Bakamla dalam penanganan keamanan di laut di Zona Maritim Barat, berikut ini beberapa saran dari peneliti, diantaranya:

1. Sesuai dengan tugas dan perannya maka Bakamla harus meningkatkan perannya dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat, yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut, agar hasil yang di harapkan yaitu terwujudnya kondisi laut yang aman, damai, lestari dan sejahtera. Serta masih harus terus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.
2. Bakamla yang ada di wilayah zona maritim barat kiranya dapat melengkapi Armada kapal patroli Bakamla serta sarana sistem peringatan Dini. berupa Radar, AIS di 16 titik. Semua itu harus ditambah untuk pengawasan keamanan laut terhadap perairan Indonesia sehingga lebih maksimal dan di dukung oleh anggaran APBN dari Pemerintah yang memadai.
3. Kepada kepala Bakamla kiranya dapat meningkatkan strategi kinerja guna mendukung transparansi data ancaman di laut sebagai suatu bentuk transparansi public guna menghasilkan *good maritime governance* atau tata kelola keamanan laut yang baik efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (1982). *Psikologi Sosial*. PT. Bina Ilmu.
- Ahmad, A. (2020). *Kebijakan Maritim Di Indonesia Dalam Perspektif Sound Governance*. Author: Eki Darmawan, Handam Handam, Arwanto Harimas Ginting.
- Alimuddin, & Supriadi. (2011). *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*
- Ansori, Ikhsanudin, A. H., & Suhardono, E. (2017). Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut Vol 3 No 3, 3(3)*.
- Arrozaaq, D.L.C. (2016) *Collaborative Governmance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation. Universitas Airlangga)
- Astungkoro, R., & Puspita, R. (2021). *Pengamanan Dua Kapal Tanker Iran dan Panama Dibantu TNI AL*. <https://www.republika.co.id/berita/qnjcsl428/pengamanan-dua-kapal-tanker-iran-dan-panama-dibantu-tni-al>
- Arie Afriansyah, "Sinergi kelembagaan dalam tata kelola keamanan laut," *Media Indonesia*, 16 september 2020, diakses 11 Juli 2022, <https://mediaindonesia.com/opini/345426/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut>
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155-173.
- Badan Informasi Geospasial. (2021). *Rapat Koordinasi Data Pulau Sepakati Jumlah Pulau Indonesia 17 Ribu*. Retrieved from Badan Informasi Geospasial: <https://big.go.id/content/berita/rap-at-koordinasi-data-pulau-sepakatijumlah-pulau-indonesia-17-ribu>
- Bakamla RI, "Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut," *Bakamla RI*, diakses 3 Maret 2021, <https://bakamla.go.id/profil/tugasfungsi>.

- Bapeten RI “Bapeten terlibat latihan gabungan penanganan radioaktif,” diakses 5 Maret 2021, <https://bapeten.go.id/berita/bapeten>
- Cassidy, F. (2016). *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek [Maritime Defence Diplomacy: Strategies, Challenges, and Prospects]*. Jakarta: Indonesian Ministry of Foreign Affairs and Centre for Strategic and International Studies.
- Djajaatmadja, B. I. (2006). Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Landas Kontinen. *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.*
- Departemen Pendidikan Nasional, (2014), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Jakarta.
- Direktorat Operasi Laut. (2020). *Laporan Hasil Kegiatan Operasi Tahun 2020.*
- Direktorat Operasi Laut. (2021a). *Dokumentasi Humas Tahun 2021.*
- Direktorat Operasi Laut. (2021b). *Laporan Hasil kegiatan operasi tahun 2021.*
- Direktorat Operasi Laut. (2021c). *Laporan Operasi Direktorat Operasi Laut Bakamla Tahun 2021.*
- Francisca Christy Rosana, “Bakamla Usir Kapal Coast Guard dari ZEE Natuna Utara,” *Tempo.co*, 13 September 2020, diakses 20 November 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1385687/bakamla-usir-kapalcost-guard-cina-dari-zee-natuna-utara/full&view=ok>
- Felldy Utama, “Bakamla: Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan, Wilayah Natuna Hancur,” *iNews*, 27 Juni 2020, diakses 3 Januari 2021, <https://www.inews.id/news/nasional/bakamla-jika-perangterbuka-terjadi-di-laut-china-selatan-wilayah-natunahancur>.
- Gibson. (2012). *Organisasi Perilaku-strukturproses, Terjemahan, Edisi V.* Jakarta.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.* Bumi Aksara.
- Imran, I. F. (2014). *Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Imigran. Gelap ke Australia. Jurusan Hubungan Internasional.* Universitas Hasanudin
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013):
- IMIC Bakamla. (2021). *Biweekly report September 2021.* Jakarta: IMIC Bakamla
- Hakiki, N., & Utomo, T. C. (2019). *Doktrin Poros Maritim Dunia Era Jokowi dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika Jalur Laut*

- Tahun 2014-2018. *Journal of International Relations*, 5(4), 609-617.
- KOMINFO. (2016). Menuju Poros Maritim Dunia. Retrieved from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritimdunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritimdunia/0/kerja_nyata)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun 2012, Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru
- Kartika, S. D. (2016). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 143-167.
- Koentjaraningrat, R. M. (2005). *Pengantar Antropologi II Pokok – Pokok Etnografi*. Rineka Cipta.
- Krina, L. L. (2012). *Teori Akuntansi: Perekrayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFEE. Laporan kegiatan FGD Direktorat Kebijakan. 2020
- Limbong, B. (2015). Poros Maritim. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Lexy Moeloeng, (2017), Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mardiasmo, 2016, Memperkuat Kemaritiman di Samudera Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta.
- Marsetio. (2014). Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan [Maritim.go.id/konten/unggahahan/2017/07/Kebijakan\\_Kelautan\\_Indonesia\\_-\\_Indo\\_vers.pdf](http://Maritim.go.id/konten/unggahahan/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf)
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Misbach, A., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2022). PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN LAUT MELALUI SINERGI ANTAR INSTANSI PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(1), 76-97.
- Nina Firda Amalia, "Analisis Kewenangan Badan Keamanan Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, (2018),
- Nazli, (2016), Pertahanan dan Keamanan Kemaritiman, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Presiden 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Pub. L. No. 178 Tahun 2014 (2014).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Pub. L. No. 16 tahun 2017 (2017). [https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2017/PERPRES\\_16\\_Tah](https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2017/PERPRES_16_Tah)



un\_2017.pdf

- Peraturan Kabakamla no 11 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan program dan anggaran Bakamla tahun anggaran 2019
- Peraturan Kabakamla no 3 tentang doktrin nomor dok-01 tahun 2020, tentang operasi keamanan laut di Bakamla, Tahun 2021
- Pokok-pokok kebijakan Kabakamla no 171 tahun 2019
- Pokok-pokok kebijakan Kabakamla no 1.C tahun 2021
- Riyadi. (2012). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan
- Reza Rachmat Barkah,(2017), “Peran Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
- Roe, M. (2013). *Maritime Governance and Policy Making*. Springer International Publishing.
- Roe, M. (2016). *Maritime Governance: Speed, Flow, Form, Process*. Springer International Publishing.
- Rustam, I. (2017). Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi“Laut Sulu. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 161-177.
- Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap kawasan*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Salim, P., & Yenny Salim. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press.
- Salsa, S. N. (2021). Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidanaan. *jurnalretrieval*, 1(1), 69-89.
- Sanusi, (2015), Peningkatan Kemaritiman di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
- Saragi, F. K., Mamahit, D. A., & Prasetyo, T. Y. B. (2018). Implementasi Pembangunan Tol Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Maritim*, 4(1).  
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/397>
- Saraswati, A. L., & Pinatih, N. K. D. A. (2020). Strategi Keamanan Maritim Indonesia terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu Tahun 2016. *Jurnal Transformasi Global*, 7(1), 114-143.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.6>
- Satgas Maritim, 2015, <https://www.suara.com/tag/satgas-maritim>

- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Subandono Diposaptono, (2017), *Membangun poros Maritim Dunia*, Jakarta : Perpustakaan Nasional
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta).
- Suharsimi Arikunto, (2016), *Penelitian Kualitatif Suatu Pendekata*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudiro, P. A. S. (2022). Konsep Multihelix Kemandirian BAKAMLA RI Dalam Pengadaan Kapal Patroli. *DEFENDONESIA*, 6(1), 37-47.
- Taufiqerrochman, A. (2019). *Kepemimpinan Maritim* (Salim (ed.)). Pandiva Buku.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Good Governance*.
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.
- Unpad.ac.id/2020/08/indonesia-bisa-sejahtera-dari-sektor-ekonomi-kelautan/Undang - Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
- Undang - Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2014, Pub. L. No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (2014).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 33 Ayat 3.
- Undang - Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2008, Pub. L. No. 17 Tahun 2008.
- Victoria, W. (2020). *Ratas Kebijakan Kelautan RI, Kepala Bakamla Simak Arahan Presiden*. Jakarta.com. <https://www.ayojakarta.com/nasional/pr-76746305/Ratas-Kebijakan-Kelautan-RI-Kepala-Bakamla-Simak-Arahan-Presiden?page=all>
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wasisto, G. (2015). *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wangke, H. (2018). *Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim* (1 ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

# LAMPIRAN



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

### Peran Bakamla dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat

KONSEP PENELITIAN	FOKUS PERMASALAHAN	ASPEK	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	INSTRUMEN	SUMBER DATA
Peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat	Bagaimana peran bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat	Peran Bakamla	1. Telaah dokumen	Pedoman Telaah dokumen	Dokumen
			2. Wawancara	Pedoman wawancara	<i>Key informant</i>
		Penanganan keamanan di laut	1. Telaah Dokumen	Pedoman telaah dokumen	Dokumen
			2. Wawancara	Pedoman wawancara	<i>Key informant</i>
			3. Observasi	Observasi	Hasil Observasi
		Tata kelola keamanan di laut/ <i>good maritime governance</i>	1. Telaah dokumen	Pedoman Telaah dokumen	Dokumen
			2. Wawancara	Pedoman wawancara	<i>Key Informant</i>

## Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman Telaah Dokumen digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni bagaimana *out put* dari Peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat, Batam.

Dokumen yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Undang Undang No 32 tahun 2014 Tentang Kelautan
2. Perpres No 178 tahun 2014 Tentang Bakamla
3. Peraturan Kepala Bakamla No 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi keamanan dan Keselamatan laut Badan Keamanan laut.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai *tool/alat* untuk memandu pertanyaan yang akan disampaikan kepada *key informant* terkait dengan fokus permasalahan penelitian yang berkaitan dengan Peran Bakamla dalam Penanganan Keamanan laut di Zona Maritim Barat, Batam .

Adapun langkah-langkah dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Menentukan *Key informant*/nara sumber kunci.
2. Mengkonfirmasi kesediaan.
3. Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan pembicaraan.
4. Mengawali dengan membuka alur wawancara via telp.
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya..
6. Mengidentifikasi hasil tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

Pertanyaan yang diajukan kepada *key informant* seperti pada Daftar Pertanyaan dan *Key Informant* di bawah ini.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

### Daftar Pertanyaan dan Key Informant

No	Nama key Informan dan Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
1	<p><b>Bapak Prabu Airlangga, S.Kom</b>  <b>Kepala Seksi Operasi Keselamatan Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia</b></p> <p>Wawancara dilakukan pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021</p>	<p>Peran apa yang dilakukan pemerintah yakni Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut ?</p> <p>Pengendalian yang bagaimana yang dilakukan oleh bakamla untuk menjaga</p>	<p>Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Operasi Keselamatan Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bahwa: Dengan menggunakan <i>maritime border protection</i>. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah yakni Bakamla dan stakeholder dengan meningkatkan proteksi di kawasan perbatasan untuk menghindari adanya ancaman yang mungkin terjadi di wilayah perairan</p> <p>Pengendalian laut yang mencakup pengendalian permukaan laut dan udara di atasnya dengan menggelar operasi laut dan operasi udara</p>

2	<p><b>Bapak Dicky Yuniar Rushartanto,S.E. Kepala Seksi Monitoring Strategi</b></p> <p>Wawancara di lakukan pada hari Selasa 7, September 2021</p>	<p>keamanan dan keselamatan di laut ?</p> <p>Peran Bakamla yang bagaimana, untuk mengurangi tindak pidana di laut khususnya di kepulauan Riau ?</p>	<p>maritim. Kondisi ini berlaku pada setiap tingkat ancaman,</p> <p>Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Monitoring Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bahwa dengan dilaksanakan operasi rutin yang dilakukan oleh Bakamla maka diharapkan pelanggaran yang terjadi di wilayah kepulauan Riau dapat berkurang sehingga wilayah kepulauan Riau khususnya perairan Batam menjadi aman. Sasaran operasi yang diharapkan oleh Bakamla adalah menurunnya angka pelanggaran hukum di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan barang, penyelundupan manusia, serta peredaran narkoba</p>
---	---	---	---



3	<p><b>Bapak Tri Yoyon,S.Kom.,M.T Kepala Seksi pengolahan Basis Data</b></p> <p>Wawancara dilakukan pada hari jum,at, 24 September 2021</p>	<p>Keterbatasan apa yang menjadi faktor pendukung peran bakamla dalam menjaga keamanan di laut kurang maksimal</p> <p>Apakah penting keamanan dan Keselamatan di laut?</p>	<p>Dengan adanya keterbatasan dukungan anggaran pertahanan dan keamanan juga menjadi salah satu permasalahan penting dalam meningkatkan kinerja keamanan laut.</p> <p>Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengolahan Basis Data Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bahwa: Yakni pentingnya keamanan laut, perlu kiranya menyamakan persepsi mengenai definisi keamanan laut. Keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di</p>
---	--	--	--

		<p>Kejahatan laut lintas Negara yang bagaimana yang sering terjadi di zona maritim barat?</p>	<p>laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut.</p> <p>Pelanggaran hukum di laut yang sering terjadi yakni kejahatan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan Imigran, perdagangan gelap senjata api, penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, <i>environmental crime (illegal</i></p>
--	--	---	--

4	<p><b>Ibu Mia Mantopani,S.H.,M.H</b>  <b>Kepala seksi Penyiapan kebijakan</b></p> <p>Wawancara dilakukan pada hari Senin, 4 Oktober 2021</p>	<p>Apakah data yang di berikan oleh Bakamla sangat akurat?</p> <p>Dengan cara apa permasalahan tumpang-tindih tugas keamanan dan keselamatan di laut Indonesia acap kali terjadi agar semua permasalahan tersebut dapat teratasi?</p>	<p><i>logging dan illegal fishing), cyber crime dan computer-related crime.</i></p> <p>Pastinya informasi atau data mengenai keamanan dan keselamatan di laut yang ada di Bakamla adalah data resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>Hasil wawancara Penulis dengan Kepala seksi Penyiapan Kebijakan dengan adanya Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut yang baik yang bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan</p>
---	--	---	---

		<p>Bagaimana Konsep yang dilakukan Bakamla dalam melakukan Tata kelola keamanan di laut?</p>	<p>efisien. Hal ini diperlukan untuk sinkronisasi dan implementasi efektif di berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan regional yang harus selaras dengan aturan internasional di bidang kelautan dan kemaritiman</p> <p>Bakamla dalam konsep tata kelola memiliki tugas, pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama kemudian mengembangkan hubungan antar pihak pihak yang terkait, kedua, mempengaruhi dan mengarahkan hubungan untuk memperoleh hasil, dan ketiga membangun mekanisme untuk koordinasi yang efektif.</p>
--	--	--	--

		<p>Bagaimana Permasalahan di laut dapat teratasi ?</p> <p>Dengan dasar apa Bakamla melakukan tugasnya di laut?</p>	<p>Semua permasalahan tersebut dapat teratasi dengan adanya Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut yang baik yang bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien.</p> <p>Dengan tanggung jawab penegakan hukum dilaut tersebut yang tertuang di UU no 32 tahun 2014 sebagai dasar di bentuknya Bakamla dan kebutuhan untuk berkoordinasi dengan instansi dan kementerian terkait, pengumpulan dan berbagi informasi menjadi sangat penting bagi tata kelola <i>coast guard</i> yang baik.</p>
--	--	--	---

5.	<p><b>Bapak Demo Putra,S.T.,M.Eng</b>  <b>Kepala Seksi Pemantauan data dan jaringan satelit</b></p> <p>Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 13 Oktober 2021</p>	<p>Dilihat dari peran Bakamla di laut, Pelanggaran apa yang sering terjadi di laut?</p>	<p>Dari Hasil wawancara kami dengan kepala seksi pemantauan data dan jaringan satelit yakni: Pelanggaran tertinggi terjadi dalam bidang IUUF (Kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau yang dikenal dengan Illegal), serta diikuti dengan penyelundupan dari perbatasan. Perkiraan ancaman tahun 2021 berdasarkan analisa ancaman menunjukkan keragaman potensi ancaman di beberapa lokasi operasi di zona maritim barat antara lain, perbatasan natuna, selat malaka,</p>
----	--	---	---

		<p>Dari faktor apa yang mempengaruhi terhadap Peran Bakamla dalam Penanganan keamanan laut di zona maritim barat?</p>	<p>perairan perbatasan Malaysia dan Singapura. Saat ini di wilayah perbatasan negara tetangga didominasi penyelundupan seperti narkoba, komoditas dan orang. “Illegal fishing juga masih terjadi di wilayah perbatasan seperti Natuna Utara, kondisi dan tantangan Bakamla di zona maritim barat dalam menjalankan tugasnya sebagai Indonesia Coast Guard.</p> <p>Dari Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi terhadap Peran Bakamla dalam Penanganan keamanan laut di zona maritim barat, yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut, mempunyai beragam faktor</p>
--	--	---	---

		<p>Apa wujud transparansi Bakalma ke public?</p>	<p>masalah tetapi tidak terlepas disitu bakamla dengan seiringnya waktu sudah cukup baik dan sudah melakukan perbaikan dan melakukan komunikasi kepada para pelaksana dan steakholder yang mempunyai wewenang dilaut dalam meningkatkan peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut di zona maritim barat.</p> <p>Saat ini Indonesia <i>Maritime Information Center (IMIC)</i> sebagai wujud transparansi Bakamla Terhadap Publik</p>
--	--	--	--



**FOTO WAWANCARA**

**FOTO WAWANCARA DENGAN *KEY INFORMANT 1***



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

**FOTO WAWANCARA DENGAN *KEY INFORMANT 2***



**FOTO WAWANCARA DENGAN *KEY INFORMANT 3***



**FOTO WAWANCARA DENGAN *KEY INFORMANT 4***



**FOTO WAWANCARA DENGAN *KEY INFORMANT 5***



## OBSERVASI

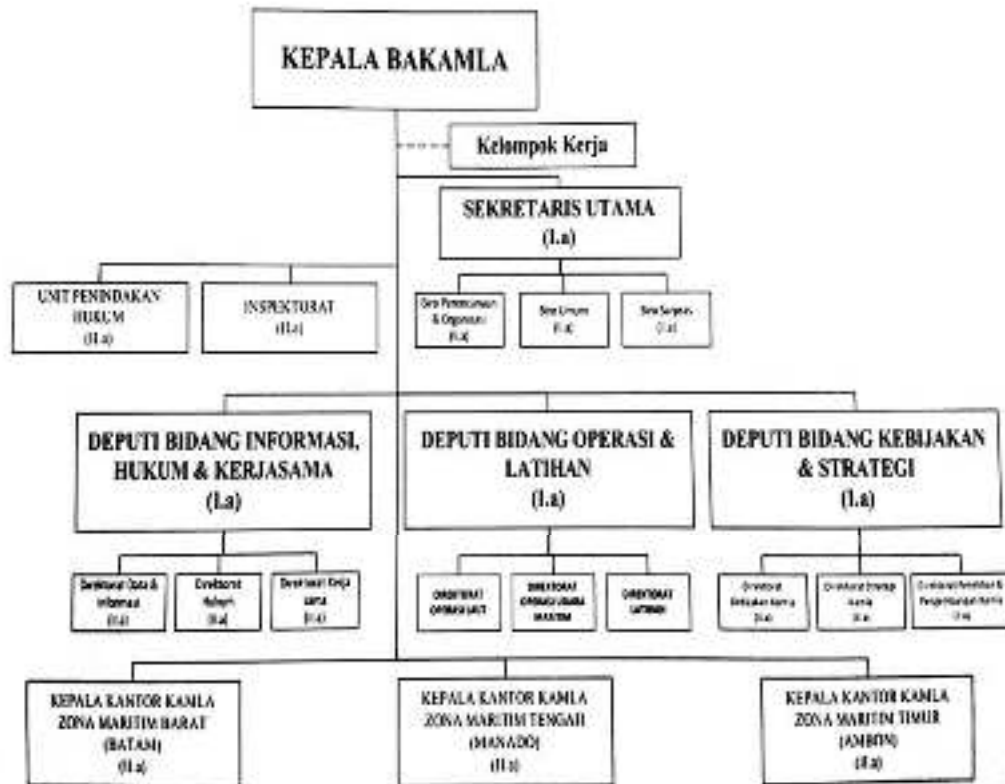


Pemantauan langsung oleh Kepala badan keamanan laut di area zona maritim barat (dok humas Bakamla tahun 2021)



Serah terima dan peresmian kapal cepat patroli bakamla untuk menjaga keamanan di zona maritim barat ( dok Humas Bakamla tahun 2021)

## STRUKTUR ORGANISASI BAKAMLA



### *Struktur Organisasi*

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 178 Tahun 2014



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama penulis : Agus Aryanto
- Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 2 September 1979
- Alamat Rumah & Nomor Telepon : Jl.Mandala Rt 01/02 No 24 Cijantung JakTim  
087771744720
- Status Perkawinan : Menikah
- Nama Instansi : Badan Keamanan Laut RI  
Alamat Instansi & Nomor Telepon : Jl Proklamasi No 56 Rt 10/02  
Peggangsaan, Menteng Jakarta Pusat
- Jabatan : Protokoler
- Pangkat dan Golongan : Penata Muda /III a
- Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri 01 lulus Tahun 1991  
b. SLTP N 103 lulus Tahun 1995  
c. SMU N 1 98 lulus Tahun 1998  
d. D III STP Aviasi lulus Tahun 2001
- Riwayat Pekerjaan : a. Garuda Indonesia Airlines  
Tahun 2001 s.d 2010.  
b. Bakamla 2010 hingga sekarang.